



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM**
3. NHK : **764604**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.715.000.000

1. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. Tanah Seluas 125 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/212 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, WARISAN Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 575 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, WARISAN Rp. 28.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 600.000.000
6. Tanah Seluas 2125 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, WARISAN Rp. 90.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m2/360 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 47.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 66.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2021, HADIAH Rp. 18.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000



3. MOTOR, HONDA STYLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
29.000.000

| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 30.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 430.838.914 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 2.241.838.914 |
| III. HUTANG | Rp. | 100.858.987 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 2.140.979.927 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.